

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Peran,Tugas dan Fungsi Kepolisian Republik Indonesia.

a. Peran pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peran yang dalam kamus bahasa Indonesia adalah partisipasi aktif yang dimiliki oleh setiap orang atau organisasi di dalam menjalankan tugas atau kewajibannya. Peran memiliki fungsi yang sangat signifikan sehubungan bidang tugas yang ada pada seseorang maupun lembaga.

Peran Kepolisian merupakan tugas yang ada di pundak seorang Polisi maupun lembaga Kepolisian sebagai aparat penegak hukum di dalam menjalankan tugas-tugasnya, dalam masyarakat keberhasilan suatu hukum sangat tergantung pada kepatuhan masyarakat tetapi kita lihat adalah sebaliknya sering masyarakat melanggar peraturan dan melakukan penyimpangan-penyimpangan, dalam hal ini yang menjadi permasalahan sekarang adalah bagaimana membuat warga masyarakat tersebut mau sadar sepenuhnya untuk mentaati peraturan dengan sukarela dan sama sekali tanpa paksaan, agar kehidupan masyarakat dapat tertata maka dibuatlah norma-norma, maka norma-norma tersebut ditegakkan melalui suatu kekuatan, kekuatan inilah yang dinamakan kepolisian.³

³ Yesmil Anwar, *Sistem Peradilan Pidana*, Bandung Widya, Padjajaran, 2009 hal 154

Kepolisian adalah segala hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dilihat dari sisi historis, istilah “Polisi” di Indonesia tampaknya mengikuti dan menggunakan istilah “Politie” di Belanda, hal ini sebagai akibat dan pengaruh dari bangunan sistem hukum Belanda yang banyak dianut di Negara Indonesia, istilah Polisi menurut Raymond b. Fosdick adalah sebagai kekuatan utama untuk melindungi individu-individu dalam hak-hak hukum mereka⁴.

Dalam UU No.2 Tahun 2002 pengertian Kepolisian terdapat dalam (Pasal 1 butir 1) yang menyatakan Polisi adalah alat negara yang merupakan pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang dan memiliki wewenang umum, Kepolisian juga disebutkan bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 1 butir 2 Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang memiliki wewenang umum Kepolisian. (Pasal 1 butir 3).

Pada masa pemerintahan orde baru Kepolisian Republik Indonesia dibenamkan dalam sebuah satuan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang bergerak dalam pengaruh budaya militer. Militeristik begitu mengikat karena masa lebih dari 30 tahun kepolisian di balut dengan budaya militer tersebut. Tahun 1998 tuntutan masyarakat begitu kuat dalam upaya

⁴ *Ibid*, hal 154

membangun sebuah pemerintahan yang bersih dan mempunyai keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat. Maka selanjutnya dikeluarkan Tap MPR No.VI/2000 dan menyatakan bahwa salah satu tuntutan reformasi dan tantangan masa depan adalah dilakukannya demokratis, maka diperlukan reposisi dan restruktur ABRI, bahwa akibat dari penggabungan terjadi kerancuan dan tumpang tindih peran dan fungsi TNI sebagai kekuatan pertahanan dan Polri sebagai kekuatan kamtibmas, maka Polri adalah alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan, artinya peran Kepolisian merupakan tugas yang ada di pundak seorang Polisi maupun lembaga Kepolisian sebagai aparat Penegak Hukum di dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Oleh karena itu Polri kembali dibawah presiden setelah 32 tahun dibawah Menhankam atau Panglima ABRI, dalam bab II Tap MPR No. VII/2000 menyebutkan bahwa: (1) Polri merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara kamtibmas, menegakkan hukum, memberikan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. (2) dalam menjalankan perannya, Polri wajib memiliki keahlian dan ketrampilan secara professional, artinya Polri bukan suatu lembaga atau badan non departemen tapi di bawah presiden dan presiden sebagai Kepala Negara bukan Kepala Pemerintahan, peran tugas dan fungsi pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 13 UU No.2 Tahun 2002 adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,
- b. Menegakkan hukum,

c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam Pasal 14 UU No 2 tahun 2002 menyebutkan Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas yaitu :

- 1) Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawal, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- 2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- 3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan Perundang- undangan.
- 4) Turut serta dalam pembinaan hukum masyarakat.
- 5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- 6) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- 7) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan Perundang-undangan lainnya.
- 8) Menyelenggarakan identifikasi Kepolisian, kedokteran Kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
- 9) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk

memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

10) Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam Organisasi Kepolisian Internasional.

11) Melaksanakan tugas lain yang termasuk dalam lingkup tugas Kepolisian.

Peranan utama polisi yang berkaitan dengan aspek preventif adalah memberi pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat yang menuju kearah terwujudnya tertib dan tegaknya hukum demi terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

Secara lebih tegas peran Kepolisian diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

b. Tugas pokok Kepolisian

Pasal 13. Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam UU No.2 tahun 2002 adalah sebagai berikut :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakkan hukum
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat

Tugas Kepolisian dijelaskan lagi pada Pasal 14 UU Kepolisian Republik Indonesia. Pada Pasal 15 dan 16 UU Kepolisian Republik Indonesia adalah perincian mengenai tugas dan wewenang Kepolisian Republik Indonesia, sedangkan Pasal 18 berisi tentang diskresi Kepolisian yang didasarkan kepada Kode Etik Kepolisian, sesuai dengan rumusan fungsi, tugas pokok, tugas dan wewenang Polri sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 2002 maka dapat dikatakan tugas utama Kepolisian meliputi :

a) Tugas Pembinaan Masyarakat (Pre-emptif)

Segala usaha dan kegiatan pembinaan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum dan peraturan Perundang-undangan. Tugas Polri dalam bidang ini adalah community policing, dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat secara sosial dan hubungan mutualisme, maka akan tercapai tujuan dari community policing tersebut, namun konsep dari community policing itu sendiri saat ini sudah biasa dilaksanakan di Polres-polres. Sebenarnya seperti yang disebutkan diatas dalam mengadakan perbandingan sistem Kepolisian Negara luar, selain harus dilihat dari administrasi pemerintahannya, sistem Kepolisian juga terkait dengan karakter sosial masyarakatnya. Konsep community policing sudah ada sesuai karakter dan budaya Indonesia (Jawa) dengan melakukan sistem keamanan lingkungan (siskamling) dalam komunitas-komunitas desa dan kampung, secara bergantian masyarakat merasa bertanggungjawab atas keamanan wilayahnya masing-masing. Hal ini juga ditunjang oleh Kegiatan BABINKAMTIBNAS yang setiap saat

harus selalu mengawasi daerahnya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan khusus.

b) Tugas dibidang Preventif

Segala usaha dan kegiatan di bidang Kepolisian preventif untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang, benda dan barang termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan , khususnya mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Dalam melaksanakan tugas ini diperlukan kemampuan professional tehnik tersendiri seperti patroli, penjagaan, pengawalan, dan pengaturan.

c) Tugas dibidang Represif

Dibidang represif terdapat 2 (dua) jenis peran dan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu Represif Justisiil dan non Justisiil. Didalam UU No. 2 Tahun 2002 memberi peran Polri untuk melakukan tindakan-tindakan Represif Non Justisiil terkait dengan Pasal 18 Ayat 1 (1), yaitu wewenang ” Diskresi Kepolisian” yang umumnya menyangkut kasus ringan. Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memberi peran Polri dalam melaksanakan tugas Represif Justisil dengan menggunakan azas legalitas bersama unsur *Criminal Justice* sistem lainnya. Tugas ini memuat substansi tentang cara penyidikan dan penyelidikan sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan peraturan Perundang-undangan lainnya. Bila terjadi tindak pidana, penyidik melakukan kegiatan berupa:

1. Mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap sebagai Tindak Pidana.
2. Menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.
3. Mencari serta mengumpulkan bukti.
4. Menemukan tersangka pelaku tindak pidana.

Adapun tindakan Represif Justisiil yang dilakukan Kepolisian adalah :

1. Penyelidikan

Di dalam Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai Tindak Pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini di dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana “Penyelidik adalah setiap pejabat Polisi Negara Republik Indonesia” selanjutnya penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Mencari keterangan dan alat bukti.
- c. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab Pasal 5 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penyelidikan juga diatur dalam Pasal 102 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sebagai berikut:

- a) Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan.
- b) Dalam hal tertangkap tangan tanpa menunggu perintah penyidik, penyelidik wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan sebagaimana yang diatur pada Pasal 5 Ayat 1 huruf (b).
- c) Terhadap tindakan yang dilakukan tersebut pada Ayat 1 dan Ayat 2 penyelidik wajib membuat berita acara dan melaporkan kepada penyidik sederhana hukum.

2. Penyidikan

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dinyatakan Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya selanjutnya yang dimaksud penyidik adalah :

- 1) Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi. Sekarang Letnan Dua Polisi diganti namanya dengan Inspektur Dua (Ipda) Polisi.
- 2) Pejabat Negeri Sipil (PNS) tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (Golongan IIb) atau yang disamakan dengan itu (Pasal 6 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Selanjutnya dalam Pasal 106 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dinyatakan bahwa penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan.

Penyidikan merupakan upaya dalam menemukan dan mengumpulkan bukti-bukti untuk menjadikan kasus itu menjadi terang sehingga dapat menemukan tersangkanya, adapun rangkaian penyidikan yang dilakukan oleh Polisi diantaranya penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan. Berikutnya pengertian penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan adalah :

1) Penangkapan

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal, serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 Ayat 20. Dalam hal penangkapan biasa maka penyidik harus membawa surat perintah penangkapan yang meliputi identitas terdakwa, alasan penangkapan, uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan, tempat ia diperiksa UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 18 Ayat 1.

2) Penahanan

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam (KUHAP) No. 8 Tahun 1981 Pasal 11 berwenang melakukan penahanan. UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 20 Ayat (1). Penahanan juga dilakukan dalam penuntutan oleh penuntut umum, hakim untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Pertimbangan adanya penahanan terhadap perkara antara lain :

- a. Berdasarkan hasil pemeriksaan diduga keras telah melakukan atau percobaan melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup.
- b. Terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana atau melakukan percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih atau diduga melakukan tindak pidana lain sebagaimanadimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 21 Ayat 4 huruf (b).
- c. Adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau merusak dan menghilangkan barang bukti, dan akan mengulangi tindak pidana.

3) Penggeledahan

Penggeledahan terdiri dari penggeledahan rumah dan penggeledahan badan. dalam hal penggeledahan rumah harus memenuhi syarat yaitu adasurat ijin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, disaksikan minimal duaorang saksi, harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan jikatersangka atau penghuni rumah menolak (Undang – Undang No. 8 Tahun1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 33 Ayat(1)). Sedangkan terhadap badan wanita harus dilakukan petugas wanitadalam hal penyidikan ini biasanya oleh polisi wanita atau petugaskesehatan yang bekerja sama dengan kepolisian.

4) Penyitaan

Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. (Undang – Undang No. 8Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1Ayat (16)). Dalam melakukan penyitaan ini harus seijin ketua pengadilannegeri setempat. Di samping penyidik ada penyidik pembantu yang mempunyai wewenang sama dengan penyidik, kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik, pelimpahan wewenang penahanan kepada penyidik pembantu hanya diberikan apabilaperintah dari penyidik tidak dimungkinkan karena hal dan dalam keadaan yang sangat diperlukan atau

dimana terdapat hambatan perhubungan didaerah terpencil atau di tempat yang belum ada petugas penyidik dan atau dalam hal lain yang dapat diterima menurut kewajaran. selanjutnya menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penyidik memiliki wewenang sebagai berikut :

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
- 2) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
- 3) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- 4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- 6) Mengambil sidik jari dan memotret seorang.
- 7) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- 8) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- 9) Mengadakan penghentian penyidikan.
- 10) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab (Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

c. Fungsi Kepolisian

Sedangkan fungsi dari Kepolisian menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dinyatakan dalam Pasal 2 : "Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat". Sedangkan Pasal 3 Ayat (1) Pengemban fungsi Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh : a. Kepolisian khusus, b. Pegawai Negeri Sipil dan/atau c. bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. (2) pengemban fungsi Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf a, b, dan c, melaksanakan fungsi Kepolisian sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar hukum masing-masing.

B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana dan Tindak Pidana

a. Pengertian Hukum Pidana

Memberikan deskripsi tentang pengertian hukum pidana tidaklah mudah. Sebab suatu pengertian yang diberikan para ahli tentang pengertian hukum pidana akan berkaitan dengan cara pandang, batasan dan ruang lingkup dari pengertian tersebut.

Tidak mengherankan jika dijumpai banyak sekali pengertian hukum pidana yang dikemukakan oleh para ahli hukum pidana yang berbeda antara satu dengan yang lain. Moeljatno mengartikan Hukum Pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang

dilarang dan termasuk kedalam Tindak Pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya⁵. Andi Zainal Abidin mengartikan hukum pidana meliputi;

Pertama, perintah dan larangan, yang atas pelanggaran-pelanggaran atau pengabaian-pengabaian telah ditetapkan sanksi terlebih dahulu oleh badan-badan negara yang berwenang. Kedua, peraturan-peraturan yang harus ditaati dan diindahkan oleh setiap orang. Ketentuan-ketentuan yang menetapkan dengan cara apa atau alat apa dapat diadakan reaksi terhadap pelanggaran-pelanggaran itu. Ketiga, kaidah-kaidah yang menentukan ruang lingkup berlakunya peraturan itu pada waktu dan di wilayah negara tertentu.⁶

Walaupun ahli hukum pidana berbeda pendapat dalam memberikan pengertian pidana akan tetapi pada dasarnya mempunyai kesamaan dalam peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dan mempunyai sanksi bagi yang melanggarnya.

Adapun pengertian hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan istilah pidana harus dikaitkan dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat 1 atau yang biasa disebut Asas *nullum delictum nulla poena sine lege* yang diperkenalkan oleh Anselm Von Ferbach, yang berbunyi sebagai berikut: Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan Perundang-undangan yang telah ada

⁵ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2001, Cet.ke I. hal.1

⁶ A.Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007, Cet.ke-2. hal.7

sebelumnya.⁷ Pengertian Hukum Pidana dapat di tentukan melalui ilmu pengetahuan yaitu:

- 1) Hukum pidana adalah hukum sanksi, maksudnya bahwa hukum tidak mengadakan norma sendiri melainkan sudah terletak pada lapangan hukum yang lain dan sanksi pidana diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma di luar hukum pidana.⁸
- 2) Hukum pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya.
- 3) Hukum pidana dalam arti Obyektif (*ius Poenale*) meliputi :
 - a. Pemerintah dan larangan yang pelanggarannya diancam dengan sanksi pidana oleh badan yang berhak.
 - b. Ketentuan-ketentuan yang mengatur upaya yang dapat dipergunakan.
 - c. Aturan-aturan yang menentukan kapan dan dimana berlakunya norma-norma tersebut. Hukum pidana dalam arti Subyektif (*ius puniendi*) yaitu hak negara menuntut hukum untuk menuntut pelanggaran delik dan untuk menjatuhkan serta melaksanakan pidana.
- 4) Hukum pidana dibedakan dan diberikan arti:
 - a. Hukum pidana materil yang menunjuk pada perbuatan-perbuatan pidana dan yang oleh sebab perbuatan itu dapat dipidana.
 - b. Hukum pidana formil yang mengatur cara hukum pidana materil dapat dilaksanakan.

⁷ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Saptta Arta Jaya, Jakarta, 1993, hal.2

⁸ Bambang Purnomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghaslia Indonesia. Jakarta. 1982. hal 19

5) Hukum pidana diberikan arti bekerjanya sebagai:

- a. Peraturan hukum Obyektif (*ius Poenale*)
- b. Hukum subyektif (*ius Puniendi*) yaitu meliputi hukum yang memberikan kekuasaan untuk menetapkan ancaman pidana, menetapkan putusan dan melaksanakan pidana yang hanya dibebankan kepada negara atau pejabat yang ditunjuk itu.
- c. Hukum pidana umum dan hukum pidana khusus.

b. Pengertian Tindak Pidana

Pembentuk Undang-Undang telah menggunakan kata *Strafbaarfeit* untuk menyebut “Tindak Pidana” di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan kata *Strafbaarfeit* tersebut. Maka dari itu terhadap maksud dan tujuan mengenai *strafbaarfeit* tersebut sering dipergunakan oleh pakar hukum pidana dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana serta delik pidana⁹. Delik adalah merupakan istilah tehnik yuridis yang hingga saat ini dikalangan sarjana hukum belum ditemukan persamaan pendapat mengenai pengakuan istilahnya dalam bahasa Indonesian, sedangkan delik dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* yang banyak digunakan oleh sarjana hukum, diantaranya yang menerjemahkan dengan perbuatan pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang dapat dihukum dan lain sebagainya. Adanya perbedaan mengenai istilah *Strafbaarfeit* disebabkan

⁹ *Hukum Pidana*, <http://wonkdermayu.wordpress.com/kuliah-hukum/hukum-pidana/>, diakses pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2016 , 19:00 WIB.

belum ada terjemahan resmi *Wetboek Van Strafrecht* dari bahasa Belanda ke bahasa Indonesia.

A. Zainal Abidin Farid memakai istilah peristiwa pidana, belum menyetujui kalau perkataan *strafbaarfeit* diterjemahkan dengan pidana, karena berbicara dalam ruang lingkup hukum secara umum.

Moeljatno merumuskan delik adalah “perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut”. Mengenai definisi “delik atau tindak pidana” (*strafbaarfeit*) dapat dilihat menurut pendapat pakar-pakar, antara lain:

- a. Moeljatno, mengatakan bahwa pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. ⁹Moeljatno, memakai istilah “perbuatan pidana” dan beliau tidak setuju dengan istilah “tindak pidana” karena menurut beliau “tindak” lebih pendek dari pada “perbuatan”, tapi “tindak” tidak menunjukkan kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan konkrit.¹⁰
- b. E. Utrecht memakai istilah “peristiwa pidana” karena yang ditinjau adalah peristiwa (*feit*) dari sudut hukum pidana ¹¹
- c. Mr. Tirtamidjaja memakai istilah “pelanggaran pidana”.
- d. Sedangkan Leden Marpaung, memakai istilah delik untuk *strafbaarfeit* agar tidak menimbulkan persepsi yang tidak tepat.
- e. Menurut D. Simon, delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang dapat dihukum.¹²
- f. Akan tetapi, *strafbaarfeit* itu oleh HOGE RAAD juga pernah diartikan bukan sebagai “suatu tindakan” melainkan sebagai suatu peristiwa atau sebagai suatu keadaan, dimana HOGE RAAD telah menjumpai sejumlah tindak pidana di bidang perpajakan yang terdiri dari peristiwa peristiwa atau keadaan-keadaan, di mana seseorang itu harus dipertanggungjawabkan atas timbulnya peristiwa-peristiwa atau keadaan-keadaan tersebut tanpa ia telah melakukan sesuatu kealpaan atau tanpa adanya orang lain yang telah

⁹A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007, Cet. ke-2, hal. 97

¹⁰Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hal. 7

¹¹*Ibid*, hal. 8

¹²*Ibid*

melakukan suatu kealpaan, hingga ia harus dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana. Dari beberapa rumusan tentang delik yang dikemukakan oleh beberapa sarjana di atas dapat disimpulkan bahwa delik adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang karena merupakan perbuatan yang merugikan kepentingan umum dan pelakunya dapat dikenakan pidana

Strabaaarbeit sebagai perbuatan pidana dengan memberikan pengertian sebagai berikut: perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.¹³

c. Tujuan pidana

Tujuan pidana dari mulai pembalasan (revenge) atau untuk tujuan memuaskan pihak-pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban kejahatan, masih dianggap primitive. Tujuan pidana lainnya yang masih dianggap primitive adalah penghapusan dosa (expiation) atau retribusi (retribution) yaitu melepaskan pelanggar hukum dari perbuatan jahat atau menciptakan balasan antara yang hak dan yang batil. Perkembangan tujuan pidana ialah variasi dari bentuk bentuk-bentuk penjeratan (deterrent) baik ditunjukkan pada pelanggar hukum, maupun kepada mereka yang mempunyai potensi maupun kepada mereka yang mempunyai potensi menjadipenjahat; pelindung hukum kepada masyarakat dari perbuatan jahat perbaikan kepada diri penjahat¹⁴. Suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana, untuk ini tidaklah cukup suatu kejahatan, melainkan

¹³ Moeljatno, *Asas-Asas hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta. 2000.hal.54

¹⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Saptta Arta Jaya, Jakarta. 1993. hal 25

harus dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau si penjahat sendiri. tidak dilihat pada masa lampau, melainkan juga masa depan. Tujuan lebih jauh dari pidana tidak hanya pemindaan penjahat akan tetapi bagaimana penjahat dapat jera dari kejahatannya atau tidak mengulangi perbuatannya (prevensi), sehingga masyarakat tidak resah. prevensi ini dibedakan prevensi umum yang ditujukan pada masyarakat agar tidak melakukan kejahatan.

d. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur yang harus ada dalam suatu tindak pidana adalah sangat penting agar dapat membedakan bahwa suatu perbuatan termasuk tindak pidana atau bukan. sebagaimana persoalan mengenai istilah dari pengertian tindak pidana maka mengenai unsur-unsur dari para ahli hukum juga tidak ada kesatuan pendapat. namun pada dasarnya suatu tindak pidana mengandung beberapa unsur sebagai berikut:

1) Unsur perbuatan atau tindakan

Suatu perbuatan atau tindakan adalah merupakan titik hubungan untuk terjadinya tindak pidana. Perkataan ini meliputi perbuatan berbuat ataupun tidak berbuat sesuatu. Contoh mengenai hal ini adalah Pasal 340 dan Pasal 304 KUHP yang lengkapnya berbunyi Pasal 340 : Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun. Pasal 304: Barang siapa dengan sengaja

menempatkan atau membiarkan seseorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan, dia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan pidana paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Pasal 340 tersebut di atas merupakan contoh pengertian berbuat sesuatu dari unsur perbuatan atau tindakan, jadi untuk melakukan perbuatan pembunuhan diperlukan suatu perbuatan atau tindakan aktif, yaitu merampas nyawa orang lain.

Adapun Pasal 304 merupakan contoh pengertian tidak berbuat sesuatu dari unsur perbuatan/tindakan, lebih jelas dengan ada kata membiarkan suatu misal seseorang tidak mau atau membiarkan bayinya dengan jalan tidak mau menyusuinya padahal secara hukum dia jelas mempunyai kewajiban memberikan kehidupan, perawatan dan pemeliharaan. Disini terdapat perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan dengan sikap pasif, membiarkan atau tidak menyusui bayinya.

2) Unsur bersifat melawan hukum

Pada dasarnya dalam hukum pidana yang menjadi perhatian adalah perbuatan yang melawan hukum saja, sebab perbuatan inilah yang sesungguhnya dilarang dan diancam dengan pidana. adapun sifat melawan hukum ini masih diartikan sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang tidak sesuai dan bertentangan dengan hukum. unsur kedua dari tindak pidana ini merupakan suatu penilaian yang obyektif terhadap perbuatannya

bukan terhadap si pembuat pidananya. Mengenai unsur melawan hukum ini terdapat dua ajaran yaitu ajaran melawan hukum formil (yang disebut melawan hukum adalah yang bertentangan dengan hukum tertulis saja) dan ajaran melawan hukum materiil (disebut melawan hukum karena bertentangan dengan hukum tertulis dan bertentangan dengan hukum tidak tertulis).

3) Unsur kesalahan

Dipidananya seseorang adalah tidak cukup apabila ia sekedar melakukan tindak pidana, tetapi unsur kesalahan pada orang tersebut juga harus ada. Inilah inti dari ajaran hukum pidana kita bahwa tidak ada pidana tanpa kesalahan. Kesalahan menurut Jonkers, pengertiannya meliputi tiga bagian, yaitu:

- a. Kesengajaan dan kealpaan.
- b. Meliputi juga sifat melawan hukum.
- c. Kemampuan bertanggung jawab.¹⁵

Jadi menurut Jonkers untuk dapat dikatakan ada suatu kesalahan dalam perbuatan pidana, jika ketiga unsur tersebut di atas meliputinya. sehingga orang dapat dipidana.

4) Unsur kemampuan bertanggung jawab

Dalam KUHP masalah kemampuan bertanggung jawab pengertiannya tidak dirumuskan secara jelas dan terang-terangan, tetapi ada satu pasal yang berhubungan dengan masalah ini, yaitu Pasal 44 Ayat

¹⁵ Samidja, *Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung. 1985. hal. 100.

1 KUHP yang menyatakan bahwa “Barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya (*grebekkigeontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*), tidak dipidana”.

Dalam pasal yang berhubungan dengan masalah pertanggung jawaban ini, sebenarnya secara tidak langsung telah memuat apa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab, di Pasal ini dimuat ulasan yang terdapat pada diri si pembuat, yang menjadi alasan sehingga perbuatan yang dilakukannya itu tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya.

5) Unsur memenuhi rumusan Undang-Undang

Unsur yang tidak kalah pentingnya apabila dibanding dengan unsur-unsur yang lain adalah unsur-unsur memenuhi rumusan Undang-Undang, yang dengan kata lain dapatlah dipahami bahwa untuk dapat dikatakan ada tindak pidana. Jika Undang-Undang sendiri telah mengatur sebelum perbuatan itu sendiri dilakukan. Hal ini akan jelas, jika kita menengok kembali Pasal 1 Ayat 1 yaitu : “Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam Perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan ”.

Dengan penjelasan pasal di atas, sudah jelas mengenai maksud dan bagaimana seharusnya pemakaian dalam praktek. Tetapi ilmu hukum adalah ilmu sosial yang selalu berkembang mengikuti perkembangan masyarakat, ternyata suatu perbuatan atau tindak pidana itu terkadang

lebih cepat ada dan berkembang dibanding dengan Undang-Undang pidana lainnya. Selanjutnya kejahatan jenis baru apakah harus dibiarkan hanya karena tidak ada dasar kekuatan hukumnya untuk menindak. dalam hal ini tergantung kebijaksanaan hakim dan hakim memiliki fungsi juga untuk membuat hukum.

C. Tinjauan Umum Tentang Perjudian

a. Sejarah Perjudian

Tindak pidana perjudian merupakan suatu tindak pidana yang sejak dahulu telah ada dan terus berkembang dalam masyarakat dengan berbagai macam bentuk dan jenisnya. Permainan judi dalam bahasa asing dikenal dengan istilah *hazardspel*.

Pada mulanya perjudian adalah salah satu kebiasaan adat dari suatu suku daerah tertentu yang hingga sekarang sering dilakukan. Perjudian yang dilakukan pada awalnya hanya berwujud permainan untuk mengisi waktu senggang guna menghibur hati dan untuk mencari kesenangan yang semata-mata dilakukan tidak untuk mendapatkan untung atau kemenangan, sifatnya pun rekreatif netral.

Seiring dengan perkembangan zaman lambat laun permainan judi mengalami perkembangan dan perubahan dalam berbagai hal, baik menyangkut macam jenis, maupun jumlah atau taruhan. Disini tidak selalu dalam bentuk uang, dapat juga berupa benda maupun tindakan lain yang bernilai taruhan dalam perjudian ini sifatnya murni spekulatif untung-untungan. Konsep

untung-untungan itu sedikit atau banyak mengandung unsur kepercayaan mistik terhadap kemungkinan peruntungan. Menurut para penjudi, nasib menang atau kalah itu sudah merupakan “suratan” sudah menjadi nasib, Masyarakat modern mengembangkan macam-macam permainan yang disertai perjudian dan menjadikan permainan tadi menjadikan aktivitas khusus yang bisa memberikan kegairahan, kesenangan, dan harapan untuk menang. Namun demikian mereka percaya unsur kepercayaan mistik terhadap keberuntungan itu.

Pada perjudian itu ada pengharapan unsur ketegangan yang disebabkan ketidak pastian menang atau kalah. Situasi tidak pasti ini membuat mereka semakin tegang dan makin gembira, menumbuhkan rasa penasaran yang kuat dan rangsangan-rangsangan yang besar untuk betah bermain. Ketegangan akan makin memuncak bila dibarengi dengan kepercayaan animistik pada nasib peruntungan. Kepercayaan semacam ini tampaknya *anakhronistik* (tidak pada tempatnya) pada masa sekarang, namun tidak urung masih melekat pula pada orang-orang modern zaman sekarang, sehingga nafsu berjudinya tidak terkendali; dan jadilah mereka penjudi-penjudi profesional yang tidak kenal rasa jera, pada masa sekarang ini bentuk perjudian ini tidak hanya bersifat mengisi waktu, tetapi tidak jarang sudah menjadi bahan bisnis yang bersifat untung-untungan bagi sebagian masyarakat. Tindak Pidana yang sulit dilakukan perseorangan ini dilakukan oleh suatu organisasi atau perkumpulan dengan jaringan yang luas.

Banyak bentuk permainan yang sulit dan menuntut ketekunan serta ketrampilan dijadikan alat judi misalnya pertandingan-pertandingan atletik, badminton, sepak bola, tinju, gulat dan macam-macam olah raga lainnya, juga pacuan-pacuan misal: pacuan kuda, karapan sapi, dll. Pada peristiwa semacam ini sering terjadi suapan-suapan dengan jumlah uang yang cukup besar untuk merangsang pemain, sehingga ada pemain-pemain yang melakukan kecurangan-kecurangan, atau bahkan bersedia “mengalah” demi keuntungan komersial satu kelompok penjudi atau petaruh tertentu. Uang suap atau sogok tersebut menstranformasikan keahlian dan ketrampilan pemain dalam bentuk kesalahan-kesalahan yang aneh, permainan kasar dan curang atau macam-macam hambatan lainnya.

b. Definisi Perjudian

Perjudian adalah pertarungan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai, dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang belum pasti hasilnya.

Dalam arti kata luas yang termasuk permainan judi juga segala permainan yang umumnya kemungkinan untuk menang tergantung pada secara kebetulan atau nasib, biarpun kemungkinan untuk menang itu biar bertambah besar pula karena latihan atau kepandaian pemain. Selain dari pada itu termasuk permainan judi juga segala pertarungan dalam pacuan kuda, perlombaan sepak bola, pertarungan antara orang-orang yang tidak ikut sendiri dalam perlombaan itu, dan sebagainya.

c. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perjudian

Di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) angka 1 dan 2 KUHP, Undang-Undang melarang dilakukannya dua macam perbuatan, yakni:

- 1) Kesengajaan melakukan sebagai usaha yakni pembuatan-pembuatan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi
- 2) Kesengajaan turut serta sebagai usaha dalam menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi. tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 303 Ayat 1 Angka 1 huruf (a) KUHP itu terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:
 - a) Unsur subjektif : dengan sengaja
 - b) Unsur-unsur objektif :
 1. Barang siapa
 2. Tanpa mempunyai hak untuk itu
 3. Menawarkan atau memberikan kesempatan
 4. Melakukan sebagai usaha
 5. Untuk bermain judi.
- 3) Untuk menyatakan pelaku terbukti memenuhi “kesengajaan” tersebut, maka di sidang pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara, hakim harus dapat membuktikan tentang:
 - a. Adanya kehendak atau maksud pelaku untuk menjadikan kesengajaan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi itu sebagai suatu usaha.

- b. Adanya kehendak atau maksud pelaku untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi.
 - c. Adanya pengetahuan pelaku bahwa yang ia tawarkan atau kesempatan yang ia berikan itu adalah untuk bermain judi.¹⁶
- 4) Tindak Pidana kedua yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 303 Ayat 1 Angka 1 KUHP itu terdiri dari unsur-unsur:
- a) Unsur subjektif : Dengan sengaja
 - b) Unsur objektif : (1). Dengan sengaja (2). Barang siapa (3).Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak ramai. Tindak Pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 303 Ayat 1 Angka 3, terdiri dari unsur-unsur objektif saja,yaitu:
 - 1. Barang siapa,
 - 2. Tanpa mempunyai hak,
 - 3. Turut serta,
 - 4. Sebagai suatu usaha,
 - 5. Dalam permainan

Walaupun pembentuk Undang-Undang tidak mensyaratkan suatu unsur subjektif di dalam rumusan tindak pidana tersebut merupakan suatu delik yang harus dilakukan dengan sengaja.¹⁷

¹⁶ Lamintang, *Delik khusus Tindak Pidana Kesusilaan*.Mandar Madju, Bandung,1984. hal. 320

¹⁷ *Ibid*.Hal. 329

Tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 303 bis Ayat 1 Angka 1 KUHP terdiri dari unsur-unsur objektif:

- 1) Barang siapa.
- 2) Memakai kesempatan yang terbukti untuk berjudi.
- 3) Yang sifatnya bertentangan dengan salah satu dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 303 KUHP.

Unsur objektif pertama menunjukkan orang yang apabila terbukti memenuhi unsur-unsur selebihnya dari tindak pidana yang dimaksudkan didalam ketentuan pidana yang diatur disebut sebagai pelaku tindak pidana tersebut.

Unsur objektif kedua maksudnya bukan setiap pemakaian kesempatan yang terbuka karena ada orang yang memberikan kesempatan untuk berjudi, misalnya dengan berjualan di tempat dimana kesempatan untuk berjudi telah diberikan oleh seseorang melainkan hanya pemakaian kesempatan dengan berjudi atau main judi.

Unsur objektif ketiga maksudnya bukan bertindak sebagai orang yang memberikan kesempatan untuk berjudi, melainkan sebagai orang yang diatur dalam Pasal 303 bis Ayat 1 angka 2 KUHP, terdiri dari unsur-unsur:

- 1) Barang siapa
- 2) Turut serta berjudi

3) Diatas atau ditepi jalan atau di suatu tempat yang terbuka untuk umum.

Unsur objektif pertama menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi unsur-unsur selebihnya dari tindak pidana yang dimaksudkan diatas, dan penyelenggaraan perjudian itu ternyata tidak mendapat ijin dari kekuasaan yang berwenang , maka ia disebut sebagai pelaku tindak pidana tersebut.

Unsur objektif kedua, kata “turut serta” jangan diartikan “keturutsertaan” atau “*deelneming*” seperti yang dimaksudkan di dalam Pasal 55 dan 56 KUHP, melainkan harus diartikan dalam pengertian yang umum menurut bahasa sehari-hari hingga orang yang *in concreto* berjudi itu juga dapat disebut sebagai telah turut serta berjudi.

Unsur objektif ketiga, yang dimaksudkan dengan “jalan umum” itulah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.

d. Pandangan Masyarakat Mengenai Perjudian dan Dampak Perjudian

Tanggapan masyarakat terhadap perjudian berbeda-beda ini. adayang menolak sama sekali, karena menganggap judi sebagai perbuatan dosa dan haram sifatnya, namun ada yang bersikap netral, ada pula yang menerimanya, bahkan menganjurkannya sebagai sumber penghasilan.

Bagi penganut Agama Kristen, perjudian adalah larangan, sebab penghasilan yang halal itu bukanlah hasil pertaruhan, akan tetapi merupakan hasil jerih payah kerja dalam usaha kita membesarkan keagungan Tuhan. Ajaran Agama Islam juga melarang perjudian, perbuatan judi atau pertaruhan

dianggap perbuatan haram. Judi merupakan bujukan setan untuk tidak mentaati perintah Allah. Karena itu sifatnya jahat dan merusak. ²Bagi masyarakat Jawa judi digolongkan ke dalam aktifitas 5-M (malima) yang merupakan tabu. 5-M itu sendiri ialah minum-minuman keras dan mabuk-mabukan, madon (bermain dengan wanita pelacur), maling (mencuri), madat (minum candu, narkotik, ganja, dan lain-lain), main judi dan bertaruh.

Bermain judi membuat orang menjadi malas, tidak mengenal rasa malu, berkulit dan bermuka tebal. Jika modalnya habis, dia bisa menjadi kalap, lalu sampai hati merampas hak milik orang lain, merampok atau mencuri harta warisan dan semua harta kekayaan, bahkan juga anak dan isterinya habis dipertaruhkan di meja judi.

Sebaliknya, apabila ia menang berjudi, hatinya senang, sifatnya sangat royal, boros, tanpa pikir, pongah, suka wanita pelacur, dan lupa daratan. Pola berjudi itu mendorong orang untuk selalu “merebut” kemenangan, dan menjadikan dirinya serakah dan gila kemenangan. Namun akibatnya dia justru menerima banyak kekalahan. Akses berjudi itu bisa merangsang orang untuk berbuat kriminal misal, mencuri, merampok, merampas, korupsi menggelapkan uang dan melakukan macam-macam tindak asusila lainnya.¹⁹Perjudian mempunyai dampak yang luar biasa terhadap kondisi pelaku, baik itu rumah tangga maupun masyarakat. Dampak yang sering muncul dengan adanya perjudian antara lain:

- 1) Ketertiban dan keamanan masyarakat terganggu.

¹⁸ Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid I*, UI Press, Jakarta, 2003. hal. 71-72

¹⁹ *Ibid.*, Hal. 72

- 2) Rusaknya ekonomi rumah tangga.
- 3) Dapat meningkatkan tindakan kriminal.
- 4) Dampak psikologi bagi pelaku serta keluarga.

Selain itu kebiasaan berjudi mengkoordinisir mental individu menjadi ceroboh, malas, mudah berspekulasi, dan cepat mengambil resiko tanpa pertimbangan. Ekses perjudian lebih lanjut antara lain ialah.²⁰

- 1) Mendorong orang untuk melakukan penggelapan uang kantor atau dinas dan melakukan Tindak Pidana Korupsi.
- 2) Energi dan pikiran jadi berkurang, karena sehari-harinya didera oleh nafsu judi dan kerakusan ingin menang dalam waktu pendek.
- 3) Badan menjadi lesu dan sakit-sakitan, karena kurang tidur, serta selalu dalam keadaan tegang, tidakimbang.
- 4) Pikiran menjadi kacau, sebab selalu digoda oleh harapan-harapan menentu.
- 5) Pekerjaan jadi terlantar, karena segenap minatnya tercurah pada keasikan berjudi.
- 6) Anak, isteri dan rumah tangga tidak lagi diperhatikan.
- 7) Hatinya jadi sangat rapuh, mudah tersinggung dan cepat marah, bahkan sering kacau meledak-ledak secara membabi buta.
- 8) Mentalnya terganggu dan menjadi sakit, sedang kepribadiannya menjadisangat labil.

²⁰ Moeljatno, *Asas-Asas hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta. 2000. hal. 6

- 9) Orang lalu terdorong melakukan perbuatan kriminal, guna “mencari modal” untuk pemuas nafsu judinya yang tidak terkendalikan itu.
- 10) Ekonomi rakyat mengalami kegoncangan-kegoncangan, karena orang bersikap spekulatif dan untung-untungan, serta kurang serius dalam usaha kerjanya.
- 11) Diseret oleh nafsu judi yang berlarut, kuranglah iman kepada Tuhan, sehingga mudah tergoda tindak asusila.

e. Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian

1. Penanggulangan dengan Cara Preventif

Penanggulangan tindak pidana perjudian dengan cara preventif artinya penanggulangan yang dilakukan dengan cara mencegah terjadinya tindak pidana perjudian itu sendiri. Disamping itu Hukum Pidana juga merupakan “obat terakhir”, yang artinya apabila sanksi lain sudah tidak mampu baru menggunakan Hukum Pidana. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh pejabat kepolisian sebagai upaya penanggulangan perjudian yang bersifat preventif, yaitu:

- 1) Memberi peringatan terhadap pelaku tindak pidana perjudian yang biasa melakukan perjudian ditempat-tempat umum.
- 2) Menjalin hubungan dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat agar membantu memberi pengarahan, bimbingan masyarakat lewat jalur Agama kepada pelaku perjudian khususnya dan masyarakat pada umumnya hal tersebut menunjukkan bahwa dengan dilakukannya upaya preventif dimungkinkan akan mencegah

terjadinya bentrokan sosial antara lapisan masyarakat yang terkait dengan tindak pidana perjudian, apabila dilakukan dengan upaya represif dari pihak kepolisian. Dengan upaya preventif ini juga dapat menjalin kedekatan hubungan antara aparat kepolisian dengan masyarakat.

2. Penanggulangan dengan Cara Represif

Salah satu cara penanggulangan Tindak Pidana perjudian dengan cara represif yaitu dengan menjatuhkan sanksi pidana pada barang siapa yang melakukan Tindak Pidana perjudian sesuai dengan peraturan dan hukum acara yang berlaku (KUHP dan KUHAP). Sanksi Pidana terdapat dalam Pasal 10 KUHP yaitu sebagai berikut.²¹

- a. Pidana pokok
 - 1. Pidana mati
 - 2. Pidana penjara
 - 3. Pidana kurungan
 - 4. Pidana denda
- b. Pidana tambahan
 - 1. Pencabutan hak-hak tertentu
 - 2. Perampasan barang-barang tertentu
 - 3. Pengumuman keputusan hakim

Pemberian sanksi pidana itu baru dapat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana apabila terbukti memenuhi unsur-unsur yang terkandung

²¹ *Ibid* hal. 6

dalam Pasal-Pasal yang berhubungan dengan tindak pidana perjudian. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh pihak Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian dengan menggunakan cara represif, yaitu:

- 1) Melakukan penyelidikan dan penyidikan sampai tuntas terhadap tindak pidana perjudian
- 2) Melakukan operasi-operasi ke tempat-tempat dan di waktu yang rawan terjadi tindak pidana perjudian.

Teori-Teori Dalam Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Nama kriminologi yang ditemukan oleh P. Tonipard (1830-1911) seorang ahli antropologi Perancis, secara harfiah berasal dari kata “crimen” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “logos” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat. (Toto Santoso, Achyani Zulfa, 2002: 9).

Kriminologi lahir dan kemudian berkembang menduduki posisi yang penting sebagai salah satu ilmu pengetahuan yang interdisiplin dan semakin menarik, bergerak dalam dua “roda besar” yang terus berputar dalam perubahan pola-pola kriminalitas sebagai fenomena sosial yang senantiasa dipengaruhi oleh kecepatan perubahan sosial dan teknologi. Roda-roda yang bergerak itu adalah penelitian kriminologi dan teori-teori kriminologi. (Soedjono Dirdjosisworo, 1994: 107).

Ada beberapa penggolongan teori dalam kriminologi antara lain (Soedjono Dirdjosisworo, 1994: 108-143) :

1. Teori Asosiasi Diferensial (Differential Association Theory)

Sutherland menghipotesakan bahwa perilaku kriminal itu dipelajari melalui asosiasi yang dilakukan dengan mereka yang melanggar norma-norma masyarakat termasuk norma hukum. Proses mempelajari tadi meliputi tidak hanya teknik kejahatan sesungguhnya, namun juga motif, dorongan, sikap dan rasionalisasi yang nyaman yang memuaskan bagi dilakukannya perbuatan-perbuatan anti sosial.

Theori asosiasi differensial Sutherland mengenai kejahatan menegaskan bahwa :

- a. Perilaku kriminal seperti halnya perilaku lainnya, dipelajari.
- b. Perilaku kriminal dipelajari dalam hubungan interaksi dengan orang lain melalui suatu proses komunikasi.
- c. Bagian penting dari mempelajari perilaku kriminal terjadi dalam pergaulan intim dengan mereka yang melakukan kejahatan, yang berarti dalam relasi langsung di tengah pergaulan.
- d. Mempelajari perilaku kriminal, termasuk didalamnya teknik melakukan kejahatan dan motivasi/ dorongan atau alasan pembenar.
- e. Dorongan tertentu ini dipelajari melalui penghayatan atas peraturan perundang-undangan; menyukai atau tidak menyukai.
- f. Seseorang menjadi deliquent karena penghayatannya terhadap peraturan perundangan lebih suka melanggar daripada mentaatinya.

g. Asosiasi diferensial ini bervariasi tergantung dari frekuensi, durasi, prioritas dan intensitas.

h. Proses mempelajari perilaku kriminal melalui pergaulan dengan pola kriminal dan anti kriminal melibatkan semua mekanisme yang berlaku dalam setiap proses belajar.

i. Sekalipun perilaku kriminal merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai-nilai, akan tetapi tingkah laku kriminal tersebut tidak dapat dijelaskan melalui kebutuhan umum dan nilai-nilai tadi, oleh karena perilaku non kriminal pun merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai-nilai yang sama.

2. Teori Tegang (Strain Theory)

Teori ini beranggapan bahwa manusia pada dasarnya makhluk yang selalu memperkosa hukum atau melanggar hukum, norma-norma dan peraturan-peraturan setelah terputusnya antara tujuan dan cara mencapainya menjadi demikian besar sehingga baginya satu-satunya cara untuk mencapai tujuan ini adalah melalui saluran yang tidak legal. Akibatnya, teori “tegas” memandang manusia dengan sinar atau cahanya optimis. Dengan kata lain, manusia itu pada dasarnya baik, karena kondisi sosiallah yang menciptakan tekanan atau stress, ketegangan dan akhirnya kejahatan.